

**STRATEGI POLITIK LBH PADANG
DALAM MEMPERKUAT MASYARAKAT SIPIL
MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH ULAYAT
(Kasus Konflik Tanah Ulayat di Nagari Mungo Kabupaten 50 Kota)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

**INDRA KURNIA
BP. 04193052**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

INDRA KURNIA (04193052) Judul Skripsi: "Strategi Politik LBH Padang Dalam Memperkuat Masyarakat Sipil Memperjuangkan Hak Atas Tanah Ulayat(Kasus Konflik Tanah Ulayat di Nagari Mungo, Kabupaten. 50 Kota)"

Gerakan LSM saat ini memainkan peran yang sangat besar dalam masyarakat. Ini bisa dilihat dari jumlahnya yang semakin banyak dan variasi dalam kegiatannya. Salah satu gerakannya adalah pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh LBH Padang terhadap masyarakat Mungo. Dalam melakukan pengorganisasian masyarakat, LBH Padang tidak hanya memfokuskan kepada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tetapi lebih ditujukan pembangunan kesadaran kritis masyarakat agar mandiri memperjuangkan hak-hak ulayat mereka .

Penelitian ditujukan untuk menjelaskan strategi politik yang dilakukan LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat. Sebagai kerangka konseptual dalam menjawab rumusan permasalahan, penelitian menggunakan konsep strategi politik *community organizing* (pengorganisasian masyarakat).

Tipe dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Data yang ditemukan dianalisis dengan menggunakan analisa etik dan emik dan sebagai unit analisisnya adalah lembaga.

Dari hasil penelitian digambarkan langkah-langkah strategis yang dilakukan LBH Padang dalam mengorganisir msyarakat Mungo. Pertama, LBH Padang melakukan penyelidikan sosial untuk mempelajari hubungan-hubungan sosial di ditengah-tengah masyarakat Mungo, serta memetakan permasalahan yang terjadi. Kedua, LBH Padang membangun kontak dengan beberapa orang masyarakat Mungo dan memfasilitasinya menjadi organizer masyarakat. Ketiga, LBH Padang melakukan proses pendidikan yang berguna untuk membangun kesadaran kritis masyarakat (Mungo), yaitu diskusi kritis(*Critical discuss*). Keempat, LBH Padang melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat Mungo di lapangan, yaitu menguasai lahan atau mempertahankan lahan merupakan langkah yang efektif demi tercapainya tujuan yag dicita-citakan oleh masyarakat Mungo,yaitu pengakuan terhadap kepemilikan hak atas tanah ulayat di nagari Mungo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya studi gerakan sosial politik sering kali memandang perilaku kelompok yang menentang kebijakan negara dan sosial sebagai sesuatu hal yang tidak wajar didalam masyarakat. Kemudian perlahan-lahan pandangan ini ditantang dengan pendekatan *rational action*¹. Individu-individu yang bergabung dalam gerakan sosial politik memiliki alasan tertentu dan alasan ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

Bahkan untuk beberapa hal, alasan individu-individu bergabung dalam gerakan sosial politik jauh lebih rasional dibandingkan individu-individu yang hanya menerima begitu saja kondisi sosial dan politik yang ada meskipun kondisi sosial dan politik tersebut menindas mereka².

Sebagai sebuah aksi kolektif, gerakan sosial politik merupakan bagian dari wacana partisipasi politik masyarakat sipil untuk melakukan perubahan sosial dan politik³. Perubahan tersebut bisa terjadi ketika struktur sosial maupun politik mengalami keterbukaan, dan keterbukaan dilihat sebagai peluang oleh para pelaku perubahan untuk melakukan gerakan⁴. Disamping itu, kemampuan untuk

¹Teori ini berpendapat bahwa gerakan sosial politik merupakan pilihan rasional setiap individu-individu yang bergabung dan bukan perilaku menyimpang. lihat Abdul Wahid Situmorang, *Gerakan Sosial (Studi Kasus beberapa Perlawanan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

² *ibid*

³ Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elit*, Resist Book, Yogyakarta, 2005. hlm 16

⁴ *Political opportunity structure (POS)*, merupakan salah satu teori dalam gerak sosial politik. asumsi dasar dari teori ini, perubahan akan terjadi ketika para pelaku perubahan atau aktor-aktor gerakan sosial politik (salah satunya LSM) melihat adanya peluang –peluang untuk melakukan perubahan ditengah –tengah keterbukaan terhadap sistem politik dalam suatu negara. *Ibid*, hlm 3- 6.

memobilisasi sumber daya oleh aktor-aktor gerakan sosial politik juga turut serta mendukung terjadinya perubahan sosial dan politik yang diinginkan. Dari situlah aktor-aktor gerakan bisa mendefinisikan masalah, sekaligus mengidentifikasi strategi untuk memperjuangkannya, agar tujuan yang dicita-citakan bisa tercapai.

Salah satu aktor dalam gerakan sosial politik yang memiliki peran penting sebagai pelaku gerakan sosial politik ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)⁵. Sebagai gerakan sosial terorganisir (*organized sosial movement*), peran LSM di Indonesia dimulai pada era 70-an⁶. Pertumbuhan LSM tersebut, tidak terlepas dari peran mahasiswa angkatan 66 dan 70-an yang pada umumnya mulai kecewa dengan perkembangan politik formal Orde Baru. Namun, generasi LSM 70-an dan 80-an memiliki cara yang berbeda dalam menentukan arah pergerakannya sebagai organisasi gerakan sosial politik.

Umumnya, aktivis LSM generasi pertama sedang membentuk identitas mereka sendiri di tengah-tengah otoriterisme Orde Baru yang semakin menguat, karena mereka juga mengalami tekanan yang besar untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian didalam sistem. Sementara di lain pihak harus tetap mengoreksi praktik-praktik otoriterisme tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah generasi

⁵Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering juga di sebut Organisasi Non Pemerintah merupakan terjemahan dari asal kata *non government organization*. Dilihat dari ciri-cirinya LSM umumnya kecil, tidak birokratis, independen dan bersifat nirlaba. Dari ciri-ciri tersebut lembaga swadaya masyarakat secara sederhana didenifinisikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lihat Riko Antoni, *Peran LP2M Dalam Melakukan Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Padang*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand, Padang, 2007, hlm 3.

⁶Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 4.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Posisi Masyarakat sangat rentan untuk menjadi korban perlakuan tidak adil. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak ulayat yang dimilikinya. Tidak adanya organisasi masyarakat independen yang memperjuangkan hak dan kepentingannya semakin mempersulit peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini melatarbelakangi pentingnya strategi politik *community organizing* (pengorganisasian masyarakat) yang dilakukan oleh LSM dalam membangun kesadaran kritis masyarakat.

Secara khusus, strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di nagari Mungo, sampai taraf tertentu, telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Mungo tentang hak-haknya, memobilisasi sumber daya masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya itu. Dalam gerakannya melakukan pengorganisasian masyarakat Mungo, LBH Padang telah melakukan beberapa langkah-langkah strategis.

Pertama, LBH Padang melakukan penyelidikan sosial untuk mempelajari hubungan-hubungan sosial di ditengah-tengah masyarakat Mungo, serta memetakan permasalahan yang terjadi. Dari langkah-langkah ini, diketahui beberapa pertimbangan LBH Padang melakukan pengorganisasian masyarakat Mungo, yaitu belum terpenuhinya seluruh hak terhadap tanah ulayat masyarakat Mungo, ditambah

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

- Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University Press, Padang, 2006
- Fakih, Mansour. 1996, *Masyarakat Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauzy, Noer. 2005, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogyakarta.
- Ihsan Ali Fauzi, Syafiq Hasyim, J.H.Lamardy.2007, *Demi Toleransi Demi Pluralisme (Esai-esai Untuk Merayakan 65Tahun M. Dawan Rahardjo)*, Paramadina, Jakarta.
- Mahasin, Aswab. 1989, *Pola Gerakan Pinggiran*. Prisma No. 7 Tahun XVIII, LP3ES, Jakarta.
- Malik, Ichsan, Noer Fauzi et al. 2003, *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Yayasan Kemala, Jakarta.
- Manan, Munafrizal.2005, *Gerakan Rakyat Melawan Elit*, Resist Book, Yogyakarta.
- Saefullah, Budi Yana. et al. 2003, *Pengorganisasian Rakyat*, INCIS, Jakarta.
- Tanjung, Herry B. dan Zaiyardam Zubir. 2002, *Profil Anggota KPMM dalam Konteks Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, KPMM, Padang.
- Situmorang, Abdul Wahid. 2007. *Gerakan Sosial (Studi Kasus beberapa Perlawanan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Buku Metodologi

- Bungin, Burhan. (2003). *Analisa Data Kualitatif*. Rajawali Perss. Jakarta.
- Moleong, Lexy J.2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.